

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sopiyan Sanjaya¹, Baharudin², Indah Satria³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung

Email: sopiyan.17211184@student.ubl.ac.id

Abstrak

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjalan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakat, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.

Kata kunci: *Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*

Abstract

Efforts to improve the welfare of rural communities and the development of independence are carried out by providing education about attitudes, skills, behavior, abilities, awareness and utilization of resources through the establishment of policies, program activities and assistance in accordance with the needs of the community. The Community Empowerment Institute as an institution to gather aspirations and realize the needs of the community that is formed on the basis of the community that is the government's partner in conducting community empowerment programs Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang Regency. The research method used in this study is a normative approach and an empirical approach. Based on the research results, Implementation of the role and function of the LPMD in improving the welfare of the community in Dwi Tunggal Jaya Village, namely in accommodating the aspirations and channeling the aspirations of the community, driving mutual cooperation and utilizing and developing potential resources and environmental harmony, explaining well and implementing existing rules. The suggestions to be conveyed in this study are: It is hoped that village officials and LPMD management will maintain consistency in

performance by increasing attention and socialization of the program to the community, and further motivating the community so that in the future village development will bring the community into an independent and independent society. proceed.

Keywords: *Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan namun didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Oleh karenanya, dalam kerangka otonomi daerah perkembangan terhadap wilayah pedesaan menjadi salah satu komponen yang esensial, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya didasari pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah (Ita Ulumiyah, 2013)

Pembangunan terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mencapai hal tersebut. Aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama dan menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional (Adi Fahrudin, 2012). Namun, sejatinya pembangunan di tingkat desa masih dapat dikatakan jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa disebabkan oleh berbagai faktor seperti jauhnya jangkauan dan sulitnya akses menuju desa tersebut. (Adi Fahrudin, 2012)

Dalam proses mewujudkan harapan tersebut pemerintah Indonesia telah merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewadahi, fasiliator, serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa (Nurmayani, 2009). Sehingga Pembangunan desa diharuskan mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diupayakan untuk meningkatkan kuallitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas(Totok Mardikanto, 2015). Sejatinya pembangunan di tingkat desa masih dapat dikatakan jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa disebabkan oleh berbagai faktor seperti jauhnya jangkauan dan sulitnya akses menuju desa tersebut (Suharto Edi, 2014).